

Menkumham Yasonna Laoly Kembali Dorong RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana

Jakarta: Detikperu.com (SMSI)- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mendorong RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana dimasukkan dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. Hal ini disampaikan Yasonna pada rapat kerja evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 bersama Badan Legislasi DPR RI di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/9/2021).

“Di Indonesia hanya dikenal adanya perampasan aset dalam sistem hukum pidana dan hanya dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” kata Yasonna.

“Sistem hukum pidana di Indonesia belum mengatur mengenai proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan kemudian perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan hukum untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab V Konvensi PBB Anti Korupsi sebagaimana telah disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. RUU ini bertujuan mengatur secara khusus mengenai hal tersebut,” ujarnya.

DPR sebelumnya menyetujui 33 RUU Prolegnas Prioritas tahun 2021 pada Maret lalu. RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana tidak termasuk di dalam daftar RUU yang disepakati tersebut. Sebagaimana disebut Yasonna, RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana ini akan memudahkan aparat hukum mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana, termasuk korupsi.

Selain RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana, Yasonna juga menyebut Pemerintah mendorong empat RUU lain untuk masuk dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun

2021, yakni RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, serta RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Mengenai didorongnya RUU KUHP yang sempat tidak diteruskan, Yasonna menyampaikan jajarannya telah melakukan sosialisasi secara luas agar publik memahami substansi serta pentingnya RUU ini. Sementara RUU Pemasyarakatan disebutkan akan menguatkan konsep keadilan restorative justice di dalam RUU KUHP.

“Pasca-tidak diteruskannya RUU KUHP ke Pembicaraan Tingkat II, Pemerintah bersama Komisi III sudah melakukan sosialisasi ke berbagai daerah dan perguruan tinggi tentang RUU ini. Yang kami peroleh dari berbagai daerah, kita sudah melihat pemahaman yang semakin dapat dimengerti oleh masyarakat,” ucap Guru Besar Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.

“RUU Pemasyarakatan juga, memperkuat konsep reintegrasi serta konsep keadilan restoratif. Ini sejalan dengan konsep restorative justice pada KUHP kita sehingga tidak terlalu jauh perbedaannya antara konsep restorative justice yang diamanatkan KUHP. Kita sudah menyiapkan dalam UU Pemasyarakatan,” katanya.

Sementara terkait RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Yasonna menyampaikan bahwa RUU ini didorong karena UU ITE yang berlaku saat ini mengalami persoalan pada sejumlah pasal yang berpotensi multitafsir.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan memperjelas kembali perbuatan-

perbuatan yang dilarang menggunakan sarana elektronik, dengan menyesuaikan kembali ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP,” ucap Yasonna.

“Selain itu juga menambah ketentuan pidana bagi setiap orang yang menyebarkan informasi atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat yang dilakukan melalui sarana elektronik,” tuturnya.

Pada rapat tersebut, Yasonna juga menyebut pemerintah sepakat untuk mengupayakan percepatan penyelesaian RUU prioritas Prolegnas 2021. Hal ini disampaikan setelah melakukan hasil monitoring dan evaluasi terhadap 10 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021 yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dari 10 RUU tersebut, satu RUU sudah disahkan menjadi UU, empat RUU dalam proses pembahasan tingkat I di DPR, satu RUU menunggu jadwal pembahasan di DPR, dua RUU dalam proses permohonan Surpres, dan dua RUU lainnya dalam proses penyempurnaan substansi.

“Memperhatikan capaian prioritas Prolegnas 2021, Pemerintah pada prinsipnya sepakat untuk mengupayakan percepatan penyelesaian RUU prioritas Prolegnas tahun 2021 yang menjadi kewajiban bersama-sama antara DPR, DPD, dan Pemerintah tanpa mengesampingkan sisi kualitas substansinya,” katanya. (DP/Rls)

Dua Petugas Rutan Kota Agung Ikuti Penguatan Pengendalian

Pungli dan Gratifikasi

Kota Agung: Detikperu.com (SMSI)- Dalam rangka mencegah praktik pungli dan gratifikasi yang semakin marak belakangan ini, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung Akhmad Sobirin Soleh memerintahkan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Prameswari dan Staf KPR igit Prayoga untuk mengikuti Mengikuti kegiatan Penguatan Unit Pengendalian Pungutan Liar dan Gratifikasi di Kanwil Kemenkumham Lampung pada Rabu (15/09).

Mewakili Kepala Rutan Kota Agung Akhmad Sobirin Soleh, Kasubsi pelayanan Tahanan Prameswari mengatakan Dalam kegiatan tersebut ada beberapa materi yang disampaikan oleh Narasumber seperti, Bapak Amrullah dari Kejati Lampung mengenai Gratifikasi selanjutnya materi dari Ibu Tri Kusuma Dewi dari Kejati Lampung mengenai Tim Saber Pungli, dan yang terakhir materi dari Bapak Slamet iman santoso Kepala bagian sistem informasi itjen kemenkumham mengenai Gratifikasi dan pungli.

" Kegiatan Penguatan yang diadakan Kanwil Kemenkumham Lampung ini sangat penting menurut saya karena praktik pungli dan gratifikasi yang semakin marak belakangan ini, apalagi narasumber yang di hadirkan sangat kompeten jadi bisa lebih mengerti mengenai bahayanya Gratifikasi dan juga pungli. " Ujarnya

Perlu kita ketahui, upaya pengendalian gratifikasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 58 Tahun 2016 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI dan juga Pedoman Dan Batasan Gratifikasi Dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.1341./01-03/03/2017 Tanggal 15 Maret 2017.

Kedepannya pengendalian gratifikasi maupun pemberantasan pungutan liar tidak hanya dapat dirasakan oleh kementerian secara umum, melainkan juga sampai kepada individu / pegawai yang bersangkutan, sehingga menghasilkan pegawai yang

berkarakter dan menjunjung tinggi nilai integritas dan untuk satuan kerja diharapkan dapat membentuk citra positif dan kredibilitas instansi serta mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif dalam pencegahan korupsi. (DP/Rls)

Sandiaga Uno Pimpin Minister Talk di Global Tourism Forum 2021

Jakarta: Detikperu.com (SMSI)- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan event Global Tourism Forum 2021 tergolong event langka di tengah pandemi COVID-19 ini oleh karena itu dia mengajak President World Tourism Forum Institute Bukit Bagci untuk meningkatkan kolaborasi dengan para pemimpin negara Asean dalam mempersiapkan pembukaan kembali pariwisata.

Berbicara dalam Minister Talk pada event GTF yang diselenggarakan Indonesia Tourism Forum, World Tourism Forum Institute dan Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Sandiaga mengatakan ke depan pengembangan pariwisata bukan lagi dalam kerangka kompetisi.

Hadir secara online pada kesempatan ini adalah H.E. Dato Ali Apong, Menteri Sumber Daya Primer dan Pariwisata Brunei Darussalam, Phiphat Ratchakitprakarn, Menteri Pariwisata dan Olahraga Kerajaan Thailand, Alvin Tan, Menteri Negara untuk Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Pemuda, dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura.

Selain itu juga hadir H.E. Doan Van Viet, Wakil Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Vietnam serta TITH Chantha, Sekretaris Tetap Kementerian Pariwisata, Kerajaan

Kamboja

“Kita harus meningkatkan kolaborasi, kerjasama informasi terutama dalam hal kasus harian pandemi global, tingkat vaksinasi dan informasi umum lainnya,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Point kedua yang perlu ditekankan adalah bahwa penerapan prosedur kesehatan di masing-masing negara Asean adalah keharusan dan menjadi isu kritis yang harus terus digaungkan dan diterapkan dengan disiplin tinggi

“Point ketiga adalah saya menghimbau Bulut Bagci, President WTFI untuk bekerjasama dengan negara-negara Asean, membangkitkan Intra Asian inbound traveler,” tambahnya.

Apalagi Ministers Talk telah menjadi bagian dari agenda Forum Pariwisata Global 2021 dan kesempatan dimana para menteri berbagi pemikiran dan pengalaman dalam masalah khusus dari rencana untuk membuka Kembali Destinasi Pariwisata ASEAN untuk Turis Internasional.

Bagi Indonesia sendiri kebijakan dan langkah-langkah utama untuk memulai kembali kegiatan pariwisata dengan cara yang paling aman dan akhirnya buka kembali destinasi wisata dengan penilaian yang teliti dan cermat.

Pada Ministre Talk tersebut, Menparekraf menekankan kesiapan RI membuka kembali destinasi wisata internasional dan yang terpenting komitmen datang dari Presiden Joko Widodo yang menggarisbawahi beberapa strategi pemulihan pariwisata.

“Kami merencanakan dan mengatur pengaktifan kembali Kalender Acara di seluruh Indonesia dengan protokol kesehatan dan keselamatan yang menyeluruh,”

Pihaknya menekankan pentingnya mengembangkan kembali tempat-tempat wisata di Indonesia

seperti MICE dan Acara (Festival, Konser Virtual, dll), Kesehatan, Kuliner, Olahraga serta Edutourism.(*)

Wapres Ma'ruf Amin: Pentingnya Peningkatan Literasi Masyarakat Mengenai Wisata Halal

Jakarta: Detikperu.com (SMSI)- Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali secara konsisten mengingatkan pentingnya pengembangan wisata halal di Indonesia dan kendala yang dihadapi karena rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal.

“Untuk itu, kita harus meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal,” ujar Wapres Ma'ruf Amin pada peresmian pembukaan Global Tourism Forum 2021 – Leaders Summit Asia 2021, hari ini Rabu (15/9) di Hotel Raffles Jakarta.

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, tren pariwisata dunia diwarnai dengan meningkatnya jumlah destinasi wisata halal di berbagai negara, tidak hanya di negara yang berpenduduk mayoritas muslim.

Bagi Indonesia, lanjut Wapres, konsep wisata halal berarti pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisatawan muslim dan destinasi wisata seperti akomodasi, restoran, makanan halal, tempat ibadah yang memadai, serta fasilitas layanan halal lainnya.

Upaya ini dimaksudkan agar Indonesia menjadi pemimpin dalam pariwisata halal global sekaligus juga untuk meningkatkan

minat wisatawan muslim dunia datang ke Indonesia.

Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Apalagi di masa pandemi COVID -19 menjadi tantangan besar bagi sektor pariwisata untuk kembali bangkit dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional.

“Perubahan tren pariwisata pasca pandemi, khususnya perhatian terhadap faktor kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian (4K) menjadi peluang bagi wisata halal untuk dapat kembali membangkitkan pariwisata nasional,” tegas Wapres Maruf Amin.

Dalam acara yang mengusung tema “Reset, Revive, Refresh Tourism” ini, Wapres mengingatkan pula bahwa dalam menetapkan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE).

“Protokol kesehatan berbasis CHSE telah menjadi standar penyiapan destinasi wisata di tanah air. Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, serta para wisatawan, baik domestik maupun internasional, untuk berdisiplin secara ketat melaksanakan protokol kesehatan CHSE,” pungkasnya.

Setelah pembukaan resmi, Menparekraf Sandiaga Uno memimpin sesi Minister Talk membahas Reopening Asean Tourism Destination for International Tourist.

Singapura diwakili oleh Alvin Tan Menteri Perdagangan dan Industri, Dr Thong Korn Menteri Pariwisata Kamboja, Nguyen Van Hung Menteri Seni, Olahraga dan Pariwisata Vietnam, Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand Phiphat Ratchakiyprakarn serta Menteri Sumber Daya Utama dan Pariwisata Brunei Darussalam Dato Seri Setia Awang Haji Ali Bin Apong.

“Kegiatan hybrid ini secara offline hanya dihadiri 70 orang dengan standar prosedur kesehatan (prokes) yang tinggi, sedangkan secara online diikuti peserta maupun organisasi pariwisata dari berbagai belahan dunia,” ujar Chairman

Indonesia Tourism Forum (ITF) Sapta Nirwandar.

Acara dimulai dengan sesi dialog ITF dengan WTFI yang dihadiri oleh Bulut Bagci sebagai President WTFI bersama beberapa pembicara internasional lainnya. Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh WTFI diberi judul Global Tourism Forum (GTF).

GTF sendiri adalah platform kolaborasi internasional yang berfokus untuk mengatasi tantangan bagi industri perjalanan. Menggabungkan upaya bersama lembaga pemerintah, pemangku kepentingan industri, dan akademisi.

“Di hari pertama ini pembicara kehormatan adalah mantan Sekjen UNWTO, Badan Pariwisata Dunia 2009-2017 Dr. Taleb Rifai dan di hari kedua (16 September), Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris 1997 – 2007 juga menjadi pembicara kunci,” jelas Sapta.

Pada hari pertama akan diselenggarakan Investor Roundtable dengan keynote speaker Menteri Pertanian RI Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, disusul pembicara tamu Ismael Ertug MEP Vice President Responsible Tourism for Transformation, Innovation & Strong Digital Europe dari Belgia.

“Tema investor Roundtable ini adalah Tourism Investment and Finance Accesing Sustainable Funding and Social Impact Capital. Ada Abdulbar M Mansoer, Presdir Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang mengelola kawasan Nusa Dua dan Mandalika, Lombok,” ungkapnya.

Narasumber lainnya di sesi ini adalah Dirjen kawasan Asia Selatan & Asia Tenggara Asian Infrastructure Investment Bank China Rajar Misra, Harry Warganegara Presdir PT Berdikari, David Makes CEO Sustainable Management dan Pendiri Plataran Menjangan.

Kemudian David St Ange mantan kandidat Sekjen UNWTO 2012-2016 dari Maladewa (Seychelle) dan agenda investor ini dipandu oleh

Senior VP Accor Indonesia dan Malaysia Adi Satria.

“Roundtable Investor alhamdulillah berlanjut ke sesi dua bahasa Sustainable Investment in Tourism Properties karena pariwisata berkelanjutan (sustainable) adalah tren dunia dan Indonesia kaya dengan properti mewah untuk pariwisata kelas dunia,” papar Sapta.

Di sesi kedua, tambahnya, ada Emma Wong PhD, GAICD akademisi dari Torrens University Australia, Regional Manager of Six Senses Hotel Resort Saudi Arabia Aeron McGrath dan Michael Scully Managing Director of First & Foremost Hotels & Resort with Travel Connection Inggris. Pada sesi kedua ini acara akan dipandu oleh Mary Pratt pendiri dan brand collaboration consultant dari Uni Emirat Arab (UAE).

Bagi Sapta, hal yang sangat membanggakan juga sebagai Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) adalah agenda pada satu sesi di hari kedua (16 September 2021) yang membahas tentang perkembangan Global Halal Tourism.

Para pembicara pada Global Halal Tourism di antaranya Reem El Shafaki dari DinarStandar Dubai, Dr Hamid Slimi Chairman Halal Expo Kanada dan James Noh Dirjen Korea Institute of Halal Industry (KIHI) Korea Selatan.

“Jadi ajang bergengsi dunia Global Tourism Forum ini menjadi forum untuk saling belajar antara negara anggotanya di dunia. Kalau di Indonesia masyarakat masih enggan bicara terbuka soal Halal Tourism atau Halal Muslim Friendly, nah negara non Muslim seperti Korea, Thailand, Jepang sudah mengambil manfaatnya yang luar biasa,” kata Sapta.

Sesi penting lainnya di hari kedua adalah Transformation of Tourism Industry Under The Women Leadership. Seperti diketahui organisasi pariwisata dunia juga dipimpin oleh para wanita.

CEO dari World Travel & Tourism Council (WTTC) Gloria Guevara digantikan oleh wanita tangguh lainnya Julia Simpson sebagai

President & CEO. Sementara CEO dari World Tourism Forum Institute (WTFI) adalah Sumaira Issacs yang di sesi ini sekaligus akan menjadi moderator.

Bulut Bagci, President WTFI yang hadir langsung di acara pembukaan ini mengatakan mengungkapkan Indonesia menjadi tuan rumah Global Tourism Forum (GTF) yang pertama di Asia.(*)

Kasrem 043/Gatam Hadiri Virtual Meeting MUSRENBANG PRPJM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Bandar Lampung: Detikperu.com (SMSI)- Kepala Staf Korem 043/Gatam Kolonel Czi Budi Hariswanto,S.Sos menghadiri kegiatan Virtual Meeting MUSRENBANG Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi Lampung Bpk.Ir.H Arinal Djunaidi, Bertempat di Ballroom Hotel Sheraton Jl. Wolter Monginsidi No.175, Gulak Galik, Kec Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung.Rabu (15/09/2021).

Berkenaan dengan hal ini, terdapat beberapa poin yang melatarbelakangi perlunya dilakukan perubahan dan kondisi yang terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 5 undang-undang nomor 23 tahun 2024 tentang pemerintahan daerah artinya tahapan proses perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 setelah mempedomani dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Gubernur Provinsi Lampung Bpk.Ir.H Arinal Djunaidi menegaskan

kembali bahwa perubahan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024 yang saat ini masih berproses dan akan dirumuskan oleh pemerintah daerah bersama DPRD bukanlah untuk mengubah visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya sekali layar terkembang tsurut kita berpantang “Visi” “ Rakyat Lampung Berjaya” yang mengusung 6 misi dan 33 agenda kerja utama akan tetapi menjadi arah dan acuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan.

“Pandemi Covid 19 yang telah mengguncang tatanan kehidupan di seluruh dunia adalah kenyataan yang tidak dapat kita hindari berbagai kebijakan program dan aksi telah dijalankan oleh pemerintah daerah yaitu implementasi kebijakan 3-T dan vaksinasi massal serta penegakan protokol kesehatan bagi masyarakat melalui penerapan 5 M termasuk upaya pemerintah daerah bersama DPRD untuk melakukan realokasi dan Refocusing APBD untuk penanggulangan dan penanganan dampak covid 19 pada penanganan kesehatan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial”, ujar Bpk.Ir.H Arinal Djunaidi

“Di sisi tata kelola pemerintah dan perencanaan pembangunan pandemi covid 19 yang semula dipandang sebagai masalah kesehatan ternyata telah meluas pada masalah sosial ekonomi bahkan sektor fiskal pemerintah daerah oleh karenanya diperlukan rekomendasi terhadap kebijakan dan strategi pembangunan serta penyesuaian terhadap kerangka pendanaan target indikator kinerja yang perlu dituangkan secara formal ke dalam dokumen perubahan RPJMD yang saat ini sedang dirumuskan”, Tutup Gubernur Lampung Bpk.Ir.H Arinal Djunaidi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Provinsi Lampung Bpk.Ir.H Arinal Djunaidi, Wakil Gubernur Provinsi Lampung Ibu Chusnunia Chalim,M.Si.M.kn, Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Ketua DPRD Provinsi Lampung Bpk.Mingrum Gumay S.H.M.M, Inspektur Prov.Lampung Ir.Fredy S.M.,M.M., Kadis Kesehatan Prov.Lampung Dr.Hj.Reihana ,M.Kes, Para Staf Ahli Gubernur Provinsi Lampung, Para Asisten Sekda Provinsi

Lampung, Para Kepala Dinas Provinsi Lampung, Kajati Provinsi Lampung DR.Hefffinur ,S.H, Karo Rena Polda Lampung Kombes Medi Medianto, Kasilitpur Brigif 4 Mar/BS Mayor Mar Dwi.H, Danlanud M.Bunyamin Letkol Nav Y.Ridwan S.T, Bupati Pesawaran Bpk Dendi Ramadona, Bupati Pringsewu Bpk. Sujadi.(DP/Rls)

PLN Gelontorkan Rp 313 Miliar untuk Dukung Penyelenggaraan PON XX Papua

Selama PON, PLN akan menyiagakan 1.574 personel untuk 45 lokasi pertandingan dan 230 lokasi strategis lainnya

Jakarta: Detikperu.com- PT PLN (Persero) mengucurkan dana Rp 313 miliar untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang digelar pada 2-15 Oktober mendatang. Selasa 14 September 2021.

Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia Syofvi F. Roekman menjelaskan, sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur kelistrikan di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika yang menjadi lokasi penyelenggaraan PON serta mendukung kegiatan pembukaan PON.

“Dari awal PLN berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan PON di Papua ini. Ini adalah perhelatan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan PON ada keberhasilan bangsa,” ucap Syofvie saat mengunjungi Stadion Lukas Enembe di Papua, Selasa (14/09).

Syofvi pun menjamin keandalan pasokan listrik di seluruh venue

dan fasilitas pendukung ajang olahraga yang digelar empat tahun sekali tersebut. Dari total daya mampu listrik mencapai 228,2 megawatt (MW), diproyeksikan beban puncak saat penyelenggaraan PON mencapai 153,5 MW. Sehingga ada cadangan daya sekitar 74,7 MW.

Selain suplai pembangkit, lanjut Syofvi, PLN telah melakukan beberapa pembangunan dan perkuatan, antara lain pembangunan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR), Gardu Hubung, Gardu Distribusi, dan yang lainnya.

Guna mengamankan kelistrikan saat berlangsungnya PON XX Papua, PLN juga menyiapkan 129 unit mobile genset kapasitas 100 kW, 200 kW, 500 kW hingga 1000 kW.

Selain itu, 55 Unit Gardu Berjalan (UGB), 45 unit Uninterruptible Power Supply (UPS) Mobile, 7 unit Unit Kabel Bergerak (UKB) dan 4 Unit Kabel dan Kubikel Bergerak (UKKB) juga disiapkan.

Di sisi lain, selama periode siaga, 18 September-15 Oktober 2021 PLN akan menyiagakan 1.574 personel di 45 lokasi pertandingan dan 230 lokasi strategis lain seperti kantor VIP, penginapan, rumah sakit, command center dan yang lainnya juga hampir rampung.

Ketua Harian Panitia Besar PON (PB PON), Yunus Wonda, menyampaikan bahwa peran PLN sangat besar untuk memastikan pasokan dan keandalan listrik pelaksanaan PON.

“Sejak lama PLN selaku mendukung pelaksanaan PON di Papua ini, terutama kebutuhan listrik di penginapan dan semua tempat yang mendukung pelaksanaan PON. Kami sangat berterima kasih kepada PLN,” tutur Yunus. (Humas)

Narahubung

Agung Murdifi

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN

Tlp. 021 7261122

Facs. 021 7227059

Catatan

PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi negeri dan turut menggerakkan perekonomian nasional. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore.

Bupati Serahkan Bantuan Bedah Rumah 2 Warga Tanggamus, dan Tinjau Pembangunan Jaringan Irigasi di Kecamatan Semaka

Semaka: Detikperu.com- Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani, kembali memberikan bantuan Program Bedah Rumah kepada warga Kabupaten Tanggamus yang dinilai memiliki rumah yang tidak layak huni, Selasa (14/9/2021).

Adapun bantuan diberikan kepada Sri Rohani, warga Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, yang rumahnya rusak berat akibat bencana bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu di Kecamatan Semaka. Bantuan lainnya diberikan kepada Media Irawan, warga Pekon Negara Batin Kecamatan Kotaagung Barat, yang dinilai memiliki rumah tidak layak huni.

Selain memberikan bantuan Program Bedah Rumah, Bupati juga memberikan tali asih kepada keduanya, sebagai bentuk kepedulian Bupati kepada warganya.

Bupati Dewi Handajani, dalam kesempatan itu menyampaikan rasa prihatinnya kepada Sri Rohani atas musibah yang melandanya.

“Semoga dengan bantuan bedah rumah ini bisa membantu keluarga Ibu Sri untuk membangun tempat tinggal kembali.”

“Selanjutnya bantuan bedah rumah yang kita berikan kepada Media Irawan tersebut, merupakan salah satu Program 55 Aksi Desa Asik, yaitu Program Bedah Rumah,” kata Bupati.

Lanjut Bupati, Pemerintah Kabupaten Tanggamus memberikan program ini untuk membantu masyarakat agar dapat memiliki rumah yang lebih layak huni dan lebih sehat.

“Harapan kami, masyarakat tetap mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Tanggamus,” harap Bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga melakukan peninjauan pembangunan jaringan irigasi di Pekon Waykerap, Kecamatan Semaka.

Kunjungan ini dilakukan Bupati, untuk memastikan agar pembangunan yang dilakukan dilaksanakan dengan baik, sehingga nantinya memberikan manfaat kepada masyarakat setempat, khususnya para petani.

Bupati menerangkan bahwa pembangunan jaringan irigasi ini memiliki volume panjang lebih kurang 2 Km, dengan lebar 1 m, dan kedalaman 80 cm, yang fungsinya untuk mengairi lahan sawah seluas 600 hektar, yang dibangun dengan total anggaran 2,5 Milyar.

Bupati juga berpesan kepada masyarakat agar menjaga dan memelihara bangunan irigasi yang sudah dibangun oleh pemerintah, sehingga dapat dimanfaatkan lebih lama lagi.

“Saya berpesan kepada masyarakat, agar menjaga dan memelihara

bangunan irigasi ini, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan lebih lama untuk mengalirkan air ke sawah para petani,” pungkas Bupati. (Kominfo/A/A)

Puan: Jangan Kendor Walau Penularan Covid-19 Terus Melandai

Jakarta: Detikperu.com- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh pihak tetap waspada dan tidak lengah walaupun laju penularan Covid-19 terus menurun. Kewaspadaan justru perlu ditingkatkan mengingat mulai terjadi pengabaian prosedur, seperti tiga ribuan lebih orang yang kedapatan berkeliaran meski terpapar Covid-19.

“Hal ini menandakan perlunya pengetatan pengawasan. Walaupun PPKM terus mengalami tren penurunan status, jangan lengah, jangan kendor, agar tidak lagi terjadi lonjakan kasus lagi,” kata Puan, Selasa (14/9/2021).

Kementerian kesehatan (Kemenkes) melaporkan sebanyak 3.830 orang berstatus ‘hitam’ terdeteksi berkeliaran di tempat umum termasuk mal, bandara, stasiun, transportasi umum, hingga restoran, lewat aplikasi PeduliLindungi. Status hitam sendiri berarti orang yang terpapar atau merupakan kontak erat dengan pasien Covid-19.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu meminta Satgas Penanganan Covid-19 menerjunkan tim reaksi cepat jika mengetahui adanya orang berstatus hitam yang berkeliaran di tempat umum. Puan menilai, aplikasi PeduliLindungi bisa menjadi dasar pelacakan (tracing).

“Pasien-pasien Covid-19 yang berada di tempat umum agar segera dilakukan dikarantina untuk menghindari penularan, dan dirawat sebaik mungkin hingga mereka sembuh,” tuturnya.

Pemerintah sendiri memutuskan memperpanjang PPKM level 2, 3, dan 4 di Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali. Saat ini tidak ada provinsi di Jawa-Bali yang berstatus PPKM Level 4 setelah Bali turun status menjadi PPKM Level 3. Meski begitu masih ada beberapa kota/kabupaten yang berada di level 4.

Di daerah luar Jawa-Bali juga tidak ada provinsi dengan status PPKM level 4, walaupun 23 kabupaten/kota masih diterapkan PPKM level 4 yang menandakan kasus Covid-19 masih tinggi di daerah-daerah tersebut.

“Melandainya kasus Covid ini harus dijadikan momentum untuk berbenah, siapkan infrastruktur kesehatan, terutama infrastruktur khusus untuk menangani kasus-kasus Corona,” sebut Puan.

Dengan infrastruktur kesehatan yang memadai, diharapkan tidak ada lagi gelombang Corona berikutnya. Puan mengatakan, sarana dan prasarana bagi masyarakat terkait Covid-19 juga harus dimaksimalkan.

“Sehingga tidak lagi terjadi kekurangan bed bagi pasien Corona di rumah sakit, kelangkaan oksigen, obat-obatan, dan lain sebagainya,” ujar mantan Menko PMK itu.

Puan pun meminta pemerintah mengoptimalkan mitigasi kemungkinan-kemungkinan yang muncul dampak Covid-19, mengingat virus Corona juga terus bermutasi. Ia mengingatkan perlunya memperkuat penanganan di hulu melalui program 3T (testing, tracing, treatment) agar ketika ada kasus bisa segera ditangani, termasuk isolasi terhadap pasien.

“Terus gencarkan vaksinasi Covid-19 apalagi pemerintah pusat kini memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM. Ini jadi PR bagi pemerintah daerah sebab

bisa saja wilayahnya kembali naik status PPKM jika target capaian vaksinasi tidak terpenuhi,” papar Puan.

Dalam aturan terbaru perpanjangan PPKM, pemerintah menambah sejumlah relaksasi seperti uji coba pembukaan bioskop dan tempat wisata untuk daerah dengan PPKM Level 3, 2, dan 1. Puan mengingatkan agar relaksasi tersebut tetap mempertimbangkan potensi terjadinya kerumunan.

“Untuk sektor-sektor tertentu seperti pembukaan bioskop dan tempat wisata di wilayah hijau harus dilakukan secara hati-hati. Termasuk juga Pembelajaran Tatap Muka (PTM) juga perlu ada evaluasi berkala,” ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Di sisi lain, Puan juga menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran pemerintah dan instansi terkait sehingga kasus Corona di Indonesia terus mengalami penurunan. Menurutnya, keberhasilan perbaikan kasus Covid-19 merupakan buah dari gotong royong seluruh elemen bangsa, termasuk dari rakyat sendiri.

“Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan yang tak kenal lelah merawat saudara-saudara kita yang sakit. Dan tentunya juga kepada masyarakat atas kerja samanya selama penerapan PPKM,” tutup Puan. (rls)

Puan: DPR Perjuangkan Dana Pensiun Atlet Lewat RUU SKN

Jakarta: Detikperu.com- Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kurangnya kesejahteraan para atlet ketika memasuki pensiun menjadi perhatian serius DPR. Melalui RUU Sistem Keolahragaan

Nasional (SKN) yang sedang dibahas, DPR akan memperjuangkan dana pensiun bagi para atlet.

Puan menjelaskan, RUU SKN akan menjadi rancangan besar (grand design) olahraga nasional 2021-2045, yang di dalamnya mencakup berbagai hal mengenai sistem keolahragaan nasional, termasuk jaminan kesejahteraan atlet, jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.

“Soal kesejahteraan atlet ini tidak cukup hanya sebatas bonus, karena bonus hanyalah reward atas sebuah prestasi. Kesejahteraan atlet harus masuk sampai jaminan sosial para atlet sampai pensiun,” kata Puan, Selasa (14/9/2021).

Oleh karenanya, kata Puan, lewat revisi RUU SKN pihaknya mendorong agar para atlet yang sudah tidak produktif lagi, bisa memiliki dana pensiun.

“Kami tidak ingin mendengar lagi ada mantan atlet yang sudah mengharumkan nama bangsa, akhirnya bekerja serabutan untuk menghidupi hari tuanya karena tidak memiliki dana pensiun,” kata Puan.

Berdasarkan survei Litbang Kompas baru-baru ini, diketahui sebanyak 84,2 persen responden yang merupakan atlet aktif tidak memiliki jaminan hari tua. Sementara untuk mantan atlet, ada 75,2 persen yang tidak memiliki jaminan hari tua. Kemudian 35,2 persen atlet yang menjadi responden mengaku tidak memiliki asuransi kesehatan.

“Bagaimana bisa para atlet nasional yang sudah mengorbankan masa mudanya demi bangsa dan negara, kemudian tidak punya jaminan sosial di hari tuanya. Negara harus segera membenahi ini,” tegas Puan.

Puan mengatakan, DPR akan memperjuangkan dana pensiun atlet ini agar menjadi salah satu bagian dari program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Dana pensiun atlet ini adalah amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat,” kata Puan tentang Pasal 28H ayat (3) UUD 1945.

Untuk diketahui, RUU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Bahkan, RUU ini ditargetkan selesai dalam masa sidang I Tahun Sidang 2021-2022 DPR RI yang sekarang sedang berjalan. (rls)

Henry Yosodiningrat Resmi Polisikan Pemilik Akun Youtube Mahakarya Cendana dan Akun Tiktok Jatim070881

Jakarta: Detikperu.com- Datang bersama dengan dua putranya ke Polda Metro Jaya, H. KRH. Henry Yosodiningrat, SH., MH resmi melaporkan Pemilik Akun Youtube Mahakarya Cendana dan Pemilik Akun Tiktok Jatim070881.

“Hari ini Senin 13 September 2021, Saya ke Polda Metro Jaya didampingi 2 orang Putra saya Dr. Radhitya Yosodiningrat, SH, MH (Adhit) dan Dr. Sangon Ragahdo, SH, LLM (Aga),” ucap Henry dalam keterangan tertulisnya. Senin (13/9/2021).

Henry melaporkan dua pemilik akun medsos tersebut karena merasa telah difitnah dan disebarkannya berita bohong yang dibuat seolah-olah membenarkan rumor yang berkembang dimasyarakat belakangan ini tentang Wafatnya Megawati Soekarnoputri.

“Secara Resmi saya telah melaporkan Pemilik Akun Youtube “Mahakarya Cendana” dan Pemilik Akun Tiktok Jatim070881 yang telah memfitnah saya dan Menyebarkan Berita Bohong, dengan cara membuat Video Rekayasa seolah olah saya membenarkan Rumor tentang Wafatnya Ibu Megawati Soekarno Puteri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan,” katanya.

“Padahal gambar dan suara saya itu adalah Rekaman gambar dan suara saya pada tahun 2019 saat wafat nya Bapak Nazarudin Kiemas, Politisi Senior PDI Perjuangan (adik kandung Alm. Bpk Taufiq Kiemas),” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Tokoh publik Hendri Yosodiningrat menanggapi viralnya video ucapan duka cita lewat youtube dan whatsapp <https://youtu.be/LGjefMYvIV4> sejak Sabtu (11/9/2021). Isi video tersebut merupakan ucapan belasungkawa darinya atas meninggalnya Nasaruddin Kiemas ipar Megawati Soekarnoputri Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Ketum PDIP) yang dipelintir seolah-olah ditujukan kepada Megawati.

“Jahat dan kejamnya yang bikin fitnah ini dengan mengedit berita ketika Kakanda Nasaruddin Kiemas wafat beberapa tahun lalu,” ujar Hendri Yosodiningrat

Kabar meninggalnya ipar Megawati Soekarnoputri, Nazarudin Kiemas, memang sangat mengagetkan bagi politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Henry Yosodiningrat kala itu.

Seperti diketahui, adik dari Taufik Kiemas itu meninggal dunia di usianya yang ke-70 pada Selasa (26/3/2019) siang.

“Tahu-tahu siang tadi saya seperti kesambar gledak, dapat telepon dari keponakannya, namanya Dita, dia kasih tahu om Udin meninggal,” ujar Yosodiningrat di rumah duka kepada wartawan.

Ia mengaku sangat dekat dengan almarhum hingga menyebutnya sebagai kakak tertua dan kangen akan sapaan karibnya.

“Kakak saya yang tertua sudah meninggal saya juga sangat-sangat dekat dengan beliau. Dan selalu menyapa. Menyapa dalam arti misalnya berapa minggu enggak ketemu, ‘apa kabar de?’ dan sekarang tak bisa saya dengar lagi sapaan itu,” ujarnya dengan suara pelan.

Ia tak kuasa menahan kesedihannya hingga suaranya memelan.

Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) itu menyesalkan karena tidak sering bertemu dengan almarhum.

“Yang saya sesalkan sejak tanggal 2 Januari, saya enggak pernah ketemu lagi, ya mungkin kesibukan masing-masing,” ujarnya.

Ia mengenal Nazarudin sebagai sosok yang baik dan hangat. Yosodiningrat juga menggarisbawahi sifat mandiri dan pantang merepotkan orang lain dari Nazarudin.

“Enggak pernah ngerepotin orang, dia kan badannya besar, jalan bawa barang, mau dibawain, itu diambil sama dia enggak boleh sama dia,” ujarnya. (*)